

**KEBIJAKAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN  
PENDANAAN TERORISME (APU/PPT) UNI EROPA TERHADAP *HIGH-  
RISK THIRD COUNTRIES* PERIODE 2015-2020**

**Muhammad Taqaruby Narzain**

**ABSTRAK**

FATF menjelaskan, bahwa situasi pencucian uang dan pendanaan terorisme semakin buruk. Dengan demikian FATF semakin menyerukan Negara-negara untuk bertindak melawan praktek pencucian uang dan mendorong untuk lebih gencar memerangi praktek pencucian uang. UE tergolong wilayah yang cukup serius dan terhitung aktif dalam memerangi praktik pencucian uang, pada tahun 2015 Uni Eropa mengadopsi kerangka peraturan modern yang mencakup beberapa peraturan dan direktif, yaitu direktif keempat UE yang salah satu kebijakannya adalah menerapkan kebijakan terhadap negara ketiga, dimana komisi memiliki kewajiban hukum untuk mengidentifikasi negara-negara ketiga berisiko tinggi yang memiliki kekurangan strategis dalam rezim APU/PPT-nya. Yang mana kebijakan tersebut menuai kontroversi di tengah banyak pengamat dan masyarakat dunia. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan UE terhadap Negara ketiga berisiko tinggi tersebut serta mengungkap sebenarnya apa yang melatar belakangi UE membentuk kebijakan tersebut, Penelitian ini juga menggunakan teori Model Kebijakan Luar Negeri Adaptif dan konsep Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Hasil temuan Peneliti adalah bahwa kebijakan tersebut dibentuk berdasarkan prinsip kebijakan luar negeri dan keamanan bersama UE, yang dirancang untuk menyelesaikan konflik dan mendorong pemahaman internasional, didasarkan pada diplomasi dan penghormatan terhadap aturan internasional. Dan UE juga membuktikan bahwa kebijakan tersebut bukan saja merugikan bagi negara ketiga terkait namun juga dapat membantu untuk ekosistem keuangan negara tersebut dan bahkan internasional, walaupun diakui masih banyak kekurangan dan kekosongan, dari metodologi serta implementasi dari kebijakan tersebut.

**Kata Kunci:** Uni Eropa, FATF, Kerangka APU/PPT, Kebijakan Luar Negeri, Negara ketiga berisiko tinggi.

# EUROPEAN UNION ANTI-MONEY LAUNDERING AND COMBATING THE FINANCING OF TERRORISM (AML/CFT) POLICY ON HIGH-RISK THIRD COUNTRIES DURING THE PERIOD OF 2015-2020

Muhammad Taqaruby Narzain

## ABSTRACT

*FATF explained, that the situation of money laundering and terrorism financing is getting worse. As a result, the FATF urges states to take action against and encourages more aggressive efforts to combat money laundering and terrorism financing practices. The EU is classified as a region that is quite serious and includes being active in combating money laundering practices, in 2015 the European Union adopted a modern regulatory framework which includes several regulations and directives, namely the EU's fourth directive, one of its policies is to apply policies to third countries, where the commission has obligations law to identify high-risk third countries that have strategy deficiencies in their AML/CFT regimes. Which policy sparked debate among numerous observers and the international community. Using descriptive qualitative research methodologies, this study seeks to look into EU policies toward high-risk third countries and uncover what motivates the EU to formulate these policies. This research uses the idea of the Adaptive Foreign Policy Model, as well as the concepts of Anti-Money Laundering and Combating Financing of Terrorism. The results of the research are that the policy is formed based on the principles of the EU's common foreign and security policy, which is designed to resolve conflicts and promote international understanding, based on diplomacy and respect for international rules. And the EU has also proven that this policy is not only detrimental to the related third countries but can also help the country's financial ecosystem and even internationally, although it is recognized that there are still many deficiencies from the methodology and implementation of these policies.*

**Keywords:** *European Union, FATF, AML/CFT Framework, Foreign Policy, High-risk third countries.*